

ABSTRAK

MENTARI NAFISAH, 1305170503, ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMBERIAN PADA PT.BANK BRI UNIT MEDAN MARELAN.Skripsi Tahun 2017

Sistem pengendalian intern pada prosedur pemberian kredit merupakan proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dilaksanakan oleh tiap-tiap personil yang membutuhkan penilaian dan pemantauan kredit untuk menjaga agar kredit yang diberikan tetap lancar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengendalian intern pada prosedur pemberian kredit pada PT. Bank BRI sudah efektif dan mengetahui prosedur pengendalian kredit yang diberikan oleh bank. PT. Bank BRI Unit Medan Marelan Merupakan salah satu badan usaha milik Negara atau BUMN yang menghimpun dana dari penyalur dana kepada pihak yang membutuhkan dengan mengumpulkan dana dari pihak yang memilikinya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif untuk melakukan analisis terhadap sistem pengendalian intern atas pemberian kredit Pada PT. Bank BRI unit Medan Marelan. Jenis data yang digunakan adalah Data primer dan skunder, teknik pengumpulan data melalui metode wawancara. Berdasarkan penelitian melalui wawancara dan hasil analisis data maka dapat diketahui bahwa sistem pengendalian intern atas pemberian kredit yang diterapkan pada PT. Bank BRI Unit Medan Marelan kurang efektif. Penelitian ini diukur dengan lima unsur sistem pengendalian intern. Namun masih ada beberapa unsur yang harus dilakukan perbaikan seperti unsur aktifitas pengawasan dan pemantauan terdapat dokument yg dilapirkan oleh calon nasabah yang dapat mengakibatkan perusahaan merugi.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Prosedur Pemberian kredit

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis masi diberikan kesempatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana penulisan skripsi ini merupakan syarat dalam mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis bersyukur kepada ALLAH SWT, karena masih diberi kesempatan menyelesaikan tugas perkuliahan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK BRI UNIT MARELAN MEDAN”.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat sidang akademik yang guna memperoleh gelar sarjana di unniversitas muhammadiyah sumatera utara. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan proposal ini sehingga bermanfaat bagi semua pihak..

Dalam menyusun skripsi ini, penulis juga tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya, yang tidak pernah lelah memberikan do'a dukungan dan motivasi serta semangat yang tiada habisnya selama penulisan proposal.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE,MM,M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Novien Riyaldi SE,M,Si selaku Dosen Pembimbing yang rela hati meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada penulis demi menyelesaikan proposal ini.
6. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Teman-teman yang lagi sama-sama berjuang nulis skripsi semoga kita sukses sama-sama.

Semoga amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu tulisan proposal ini dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata, semoga proposal ini dapat bermanfaat dan berguna untuk memperkaya khasanah berpikir dan dapat menjadi referensi bagi pembaca.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Medan, Februari 2017

Penulis

MENTARI NAFISAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8

BAB II. LANDASAN TEORI

A. URAIAN TEORITIS	10
1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	10
2. Pengertian Intern Kredit.....	14
3. Perkreditan	15
4. Tujuan dan Fungsi Kredit	17
B. KERANGKA BERFIKIR.....	24

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	25
B. Defenisi Operasional Variabel	25
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	28
D. Jenis Dan Sumber Data	28
E. Teknik Analisis Data.....	29

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	31
1. Sejarah PT. Bank BRI.....	31
2. Visi Misi PT. Bank BRI.....	34
3. Struk Organisasi	35
B. Pembahasan.....	45

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pemberian Kredit Dan Kredit Macet	5
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.2 Rincian Waktu Penelitian.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2. Kerangka Berfikir.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	35
Gambar 4.2 flowchart pemberian kredit oleh nasabah.....	52
Gambar 4.3 flowchart pemberian kredit oleh penaksir	53
Gambar 4.4 flowchar pemberian kredit oleh teller	55
Gambar 4.5 prosedur pemberian kredit.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha yang bertambah pesat seiring dengan perkembangan teknologi telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya persaingan yang ketat dalam dunia usaha, penyedia barang maupun jasa serta peningkatan kebutuhan konsumen terhadap suatu barang atau jasa, dengan semakin berkembangnya dunia usaha maka kegiatan dan masalah yang dihadapi oleh perusahaan semakin kompleks, sehingga semakin sulit bagi pihak pimpinan untuk melaksanakan pengawasan atau mengkoordinir secara langsung terhadap seluruh aktivitas perusahaan.

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang tidak digunakan dalam jangka waktu panjang atau pendek oleh nasabah, tetapi dimanfaatkan untuk menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman yang diatur didalam undang-undang No.10 tahun 1998 yang mengatur tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

PT. Bank BRI Unit Medan Marelan merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa keuangan yang fokus

pelayanannya sebagai penyedia jasa. Sebagian besar dana yang diperoleh bank dari masyarakat yang menyimpan dananya dalam bentuk simpanan giro, deposito dan tabungan yang biasanya dalam bentuk jangka pendek yang kemudian akan disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, sedangkan bank menggunakan kredit dalam bentuk pinjaman berjangka panjang yang bisa menimbulkan resiko dalam dalam pemberian kredit jangka panjang.

Pemberian kredit juga mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan, maka perusahaan dalam menyalurkan kredit harus menggunakan prinsip kehati-hatian, Perusahaan harus berusaha memperkecil resiko dalam pemberian kredit, dengan memaksimalkan bunga pinjaman, dan pemberian jaminan yang pantas untuk kredit yang diberikan, maka perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha dan menentukan eksistensi dimasa depannya, sehingga dapat tetap beroperasi dalam jangka waktu kedepan.

Kegiatan perkreditan selalu menjadi hal yang sangat diperhatikan dikarenakan kegiatan perkreditan merupakan kegiatan utama perusahaan dalam menjalankan usahanya. Perusahaan sebagai penyalur kredit kepada nasabah terkadang mengalami kesulitan yaitu adanya tunggakan kredit atau kredit macet. Faktor yang bisa menyebabkan kredit macet atau kredit bermasalah meliputi faktor eksternal dan internal dari lembaga keuangan tersebut. Faktor eksternal seperti pihak nasabah dapat mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajiban kepada perusahaan atau lembaga keuangan sehingga kredit yang diberikan macet atau ada unsur tidak sengaja dimana debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu misalnya nasabah yang dibiayai mengalami musibah seperti kematian, kena hama,

kebanjiran dan kebangkrutan usaha. Faktor internal berasal dari karyawan yaitu dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat juga terjadi akibat dari kolusi pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif, untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kredit macet atau bermasalah maka diperlukan adanya sistem pengendalian intern yang baik.

Menurut Mulyadi (2013:163) Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

Menurut Romney(2009:229) Sistem pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal memperbaiki dan mendorong efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Sukrisno (2008:79) Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan keputusan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal tidak terlepas dari penjagaan pada prosedur pemberian kredit usaha dan tidak dimaksudkan menghilangkan semua kemungkinan terjadi kesalahan dan penyelewengan, tetapi bagaimana cara usaha-usaha pengkreditan dapat dihindarkan dari keborosan waktu, tenaga ataupun dana serta tidak tergantung pada sedikit dan banyaknya tahapan yang dilalui oleh debitur, tetapi pada tahapan yang telah dilakukan dengan baik dan benar.

Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu mengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta mengurangi resiko kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Prosedur pemberian kredit menurut kasmir (2009: 115) prosedur pemberian kredit secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas
2. Penyelidikan berkas pinjaman
3. Wawancara 1
4. On The Spot
5. Wawancara II
6. Keputusan kredit
7. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya
8. Realisasi kredit
9. Penyaluran/ penarikan dana

Fenomena yang muncul yaitu pada prosedur pemberian kredit seharusnya nasabah mengisi formulir dan menyertakan beberapa dokumen yang benar dan

jujur. Namun masih ditemukan adanya penggunaan dokumen pendukung yang dilampirkan nasabah tidak sesuai seperti alamat nasabah dengan kartu tanda penduduk(KTP). Seharusnya dokumen harus memadai untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh dokument pendukung yang dilampirkan dengan benar sebagaimana mestinya sehingga seluruh transaksi dicatat dengan benar.

Hal ini tidak sesuai dengan sistem pengendalian intern menurut teori Mulyadi (2007:166) dari unsur-unsur pengendalian intern, dalam praktik yang tidak sehat dan karyawan yang mulutnya tidak sesuai dengan tanggung jawabnya yang seharusnya mengatur dan mengawasi secara detail dan teliti bagaimana prosedur pemberian kredit yang sesuai dengan yang ditetapkan.

Pemberian kredit harus dilaksanakan dengan baik dan benar karena jika pemberian kredit tersebut menyimpang dari ketentuan maka berfotensi menimbulkan kredit macet. Masalah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pemberian Kredit dan Kredit Macet
Tahun 2012-2014

Tahun	Jumlah Pemberian Kredit	Jumlah Kredit Macet	NPL
2011	Rp.29.336.985.632,00	Rp.2.102.536.987,00	9%
2012	Rp.30.589.635.986,00	Rp.2.806.593.856,00	10%
2013	Rp.31.015.465.989,00	Rp.3.016.987.452,00	10%
2014	Rp.31.674.373.373,00	Rp.3.424.170.889,00	11%
2015	Rp.32.943.722.561,00	Rp.4.659.883.332,00	15%

Sumber : PT. Bank BRI Unit Medan Marelan

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa kredit yang bermasalah di tiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan sehingga adanya kualitas kredit yang buruk karena mempunyai jumlah kredit yang bermasalah. Hal tersebut dapat terjadi karena nasabah yang sengaja tidak melunasi kreditnya maupun tidak menepati waktu pengembalian kredit.

Berdasarkan adanya indikasi masalah didalam bank, yang mana Non Performing Loan (NPL) Bank sudah tinggi pada lima tahun terakhir yaitu 15%. Maka dari itu perlu adanya pengawasan dalam pengelolaan terhadap pemberian kredit. Apabila masalah dalam bank tersebut tidak segera mendapatkan solusi maka akan berdampak bahaya pada bank. Sesuai dengan ketentuan direksi Bank Indonesia no 31/1447/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 yang tercantum dalam buku Mudrajat Kuncoro (2012:463), kualitas aktiva produktif (kredit) dinilai berdasarkan tiga kriteria : yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitor dan kemampuan membayar. Dengan tiga kriteria tersebut kualitas kredit digolongkan menjadi Lancar (L), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Apabila NPL diatas 5% dan kecenderungannya meningkat maka dapat disimpulkan bahwa: penanganan tagihan atas angsuran tidak efektif, PPAP yang harus dibentuk juga naik, adanya indikasi kredit bermasalah, penyelesaian kredit tidak terjadwal dengan baik.

Meningkatnya Non Performing Loan (NPL) pada bank jika dibiarkan secara terus menerus akan memberikan pengaruh negatif pada bank. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah kredit bermasalah yang dapat mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh bank, dapat dibayangkan jika peminjam tidak memehuhi kewajiban mereka membayar angsuran, maka bank akan kehilangan sumber pendapatannya. Akibatnya, kondisi seperti ini akan mempengaruhi kondisi deviden dan laba perusahaan.

Fenomena lain dikemukakan yaitu masih ditemukan bahwa pengawasan pada prosedur pemberian kredit belum efektif pada perusahaan tersebut, karena masih terdapat ketidakcocokan pada pengawasan dokumen yang dilampirkan oleh

calon nasabah dalam pelaksanaan otorisasi yang dilakukan, dimana ketidakcocokan otorisasi itu terdapat pada tanda tangan calon nasabah pada surat bukti kredit yang berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal ini tidak sesuai dengan teori COSO (*The Committee oh Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) pada lima komponen pengendalian intern menurut Amin widjaja (2013, hal 30) yaitu terkait pada aktifitas pengawasan. Aktifitas pengawasan merupakan kebijakan dan prosedur yang diperlukan diambil untuk menghadapi resiko-resiko yang tersangkut dalam pencapaian tujuan entitas. Dalam pengendalian fisik juga harus dilakukan pengamatan yang memadai terhadap arsip data.

Dengan melihat begitu pentingnya peranan sistem pengendalian intern, mulai dari proses awal pemberian kredit sampai ke proses realisasi kredit, untuk itu penulis mencoba membahas dan menganalisa system pengendalian intern atas pemberian kredit yang dilakukan pada PT Bank BRI Unit Medan Marelan dengan mengangkat judul “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK BRI UNIT MEDAN MARELAN”.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Terjadinya peningkatan kredit macet atau nilai NPL pada PT. Bank BRI Unit Medan Marelan
2. Terdapat dokumen pendukung yang dilampirkan oleh calon nasabah tidak sesuai dengan data yang ditulis

3. Adanya ketidakcocokan tanda tangan calon nasabah dalam dokumen yang dilampirkan oleh calon nasabah pada surat bukti kredit.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Apakah sistem pengendalian Intern atas pemberian kredit pada PT Bank BRI Medan Marelan sudah sesuai dengan standart perusahaan ?
2. Apakah faktor penyebab tingginya kredit bermasalah pada PT Bank BRI Medan Marelan ?

3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern atas pemberian kredit pada PT Bank BRI unit Medan Marelan
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab tingginya kredit bermasalah pada PT Bank BRI Unit Medan Marelan.

b. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat antara lain :

- a. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi penulis yang ingin mendalami ilmu tentang sistem pengendalian intern, pada PT Bank BRI unit Medan Marelan

b. Manfaat bagi perusahaan

Dapat digunakan sebagai masukan untuk menambah kemajuan perusahaan, khususnya agar pengawasan terhadap sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit dapat lebih efektif.

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan pengetahuan pada PT.Bank BRI unit Marelan, Medan dan menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang faktor yang mempengaruhi perkredit

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian sistem pengendalian intern

Sistem pengendalian intern meliputi dan seluruh cara-cara serta alat-alat yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan. Perusahaan menggunakan pengendalian intern untuk mengarahkan operasi dan mencegah penyalahgunaan system. Pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting sekali dalam pencapaian tujuan usaha. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian intern. Pengendalian intern memberikan jaminan yang wajar bahwa aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha, informasi bisnis akurat, dan karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan.

Menurut Mulyadi (2013:163) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akutansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Defenisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

Menurut Diana(2011:82) Pengendalian intern adalah semua rencana organisasional, Metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk menggunakan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data

akutansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Pengendalian intern meliputi beberapa aktivitas yaitu :

1. Perencanaan
2. Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi
3. Komunikasi informasi
4. Pengambilan keputusan
5. Memotifasi orang-orang dalam organisasi agar perilaku sesuai dengan tujuan organisasi
6. Pengendalian
7. Penilaian kerja

Menurut Nugroho (2007,hal 2) menyatakan sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akutansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Eli Suhayati(2009:221) menyatakan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-tujuan berikut :

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
- d. Efektifitas dan efisiensi operasi.

b. Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Suatu pengendalian yang baik perlu adanya unsur-unsur yang berhubungan langsung dengan pengendalian, sehingga tujuan dari pengendalian intern dapat tercapai. Unsur-unsur ini merupakan cara perusahaan untuk mencapai pengendalian intern.

Menurut Mulyadi (2013:165) menyatakan bahwa unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang pendapatan dan biaya. Dalam organisasi dalam setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan akan terlaksanakan dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong

praktik yang sehat, semua sangat tergantung pada individu yang mengerjakannya.

c. Tujuan Pengendalian Intern

Pengendalian intern dapat dipandang sebagai suatu system social dengan tujuan khusus yang ada dalam suatu organisasi perusahaan. Pengendalian intern itu sendiri dari beberapa kebijakan, prosedur, teknik, peralatan, fisik, dokumentasi, dan manusia. Komponen ini saling bekerja mempengaruhi satu sama lain untuk menjamin tercapainya tujuan manajemen.

Menurut Mulyadi (2013:180) menyatakan bahwa tujuan dari pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan pencapaian dalam tiga golongan tujuan sebagai :

1. Keandalan informasi keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektifitas dan efisiensi operasional

d. Keterbatasan Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2013:181) Mengidentifikasi keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern yaitu :

1. Kesalahan dalam perhitungan (*poor judgement*)

Seringkali manajemen dan personil lainnya dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadai informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lain.

2. Gangguan (*Breakdown*)

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personil memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personil atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

2. Pengendalian Intern Kredit

a. Pengertian Pengendalian Intern Kredit

Pengertian intern kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Pengendalian intern kredit penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi lembaga keuangan bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian intern kredit yang baik dan benar.

b. Pentingnya Pengendalian Intern Kredit

Kredit memberikan dampak adanya penangguhan penerimaan uang, baru pada saat jatuh temponya terjadi aliran kas masuk. Penangguhan penerimaan uang tersebut akan memberikan pengaruh yang kurang baik, apabila pemberian kredit yang diberikan terlalu besar akan terjadi penimbunan modal kerja dalam aktiva lancar kredit yang diberikan. Pengendalian intern kredit mutlak harus dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Oleh karena itu diperlukan oengelolaan piutang(kredit) yang baik yaitu

dalam bentuk kebijaksanaan kredit yang mengandung unsur pengendalian intern piutang, agar dana yang terdapat dari para debitur dapat tertagih pada waktunya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

c. Tujuan Pengendalian Intern Kredit

Tujuan pengendalian intern kredit bagi lembaga keuangan, dalam hal ini adalah untuk :

1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman
2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak
3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah
4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan
5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali
6. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit lembaga keuangan.

3. Perkreditan

a. Pengertian Kredit

Menurut Ismail (2013:93) kredit merupakan dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Sedangkan menurut undang-undang perbankan no.10 tahun 1998, kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

b. Unsur-Unsur Kredit

Menurut Ismail (2013:94) menyatakan bahwa terdapat tujuh unsur kredit, sebagai berikut :

1. Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada pihak peminjam yang merupakan kreditor.

2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain.

3. Kepercayaan

Kreditor merupakan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajiban untuk membayar pinjaman sesuai dengan jangka waktu tertentu yang dijanjikan. Lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan lembaga keuangan memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya.

4. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara lembaga keuangan (kreditor) dengan pihak peminjam (debitur).

5. Resiko

Setiap dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan selalu mengandung adanya resiko tidak kembalinya dana. Resiko ini adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit.

6. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjaman kepada kreditur.

7. Balas jasa

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditor, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam lembaga keuangan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga, sementara didalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.

d. Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut kasmir (2010:105) tujuan pemberian kredit sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh lembaga keuangan sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup lembaga keuangan.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan

dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama disektor riil.

Menurut Kasmir (2010:107) disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang luas, fungsi tersebut antara lain :

1. Untuk meningkatkan daya guna

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, jika uang hanya disimpan dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dalam satu wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit juga dapat menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit juga dapat meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau ekspor impor.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima tentu akan menambah kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya paspasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk peningkatan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian

kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

e. Kredit Bermasalah

Menurut Ismail (2013:125) menyatakan faktor penyebab kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Faktor intern lembaga keuangan

- a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit, misalnya kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga masalah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b. Adanya kolusi antara pejabat lembaga keuangan yang menangani kredit dan nasabah, sehingga lembaga keuangan memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.
- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat lembaga keuangan terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur lembaga keuangan sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan pemantauan kredit debitur.

2. Faktor ekstern lembaga keuangan

- a. Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada lembaga keuangan, karena nasabah tidak memiliki kemauan untuk memenuhi kewajibannya.
- b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi modal kerja.
- c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah yang menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.
- d. Debitur mau melaksanakan sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- e. Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi
- f. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur
- g. Bencana alam yang dapat merugikan debitur.

f. Upaya pemecahan kredit bermasalah

Menurut Ismail (2013:127) upaya yang dilakukan lembaga keuangan untuk menyelamatkan terhadap kredit bermasalah antara lain :

1. Rescheduling

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan lembaga keuangan untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dibuat dengan debitur yang mempunyai itikat baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok ataupun

angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh lembaga keuangan dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.

2. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan upaya lembaga keuangan dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.

3. Kombinasi

a. Rescheduling dan restructuring

Upaya gabungan antara dilakukan Rescheduling dan restructuring , misalnya lembaga keuangan memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit.

b. Rescheduling dan reconditioning

Lembaga keuangan dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meningkatkan bunga.

c. Restructuring dan reconditioning

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

d. Rescheduling, Restructuring dan reconditioning

Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan cara maksimal yang dilakukan oleh lembaga keuangan misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.

4. Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan anggunan yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Hasil penjualan anggunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga sisa hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur, sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur.

Tabel II-1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1.	Rizana Amania(2011)	Evaluasi terhadap sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit mikro pada PT. Bank Mandiri(persero) tbk Cabang Majapahit Semarang	Sistem pengendalian intern yang ada pada proses pemberian kredit mikro memadai dan telah dilaksanakan oleh manajemen.
2.	Triana Pratiwi(2014)	Analisis sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada PT. BPR Bukit Cati Pematang Siantar	Berdasarkan kebijakan prosedur dan pemberian kredit yang berlaku saat sebelum kredit diberikan oleh PT Bank BPR Bukit Cati kepada calon nasabah sudah efektif.
3.	Munawaroh (2011)	Peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah pada koperasi pegawai BRI Cabang Kediri	Sistem pengendalian intern yang diterapkan pada koperasi pegawai bank rakyat indonesia cabang kediri telah berjalan secara efektif dan peranan pengendalian internal dalam menunjang

			efektivitas pemberian kredit tidak dapat diabaikan
4.	Firdaus (2013)	Analisis sistem pengendalian intern pemberian kredit pada badan usaha milik desa, desa kepenuhan Barat	Analisis kredit yang dilakukan telah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak BUMDes Bina Usaha Desa kepenuhan Barat
5.	Retno (2010)	Analisis sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT Bank BNI tbk Cabang Magelang	Sistem pengendalian intern pemberian kredit dilakukan dengan unsur pengendalian intern yang belum berjalan seperti lingkungan pengendalian dan penaksiran resiko dalam menilai debiturnya sehingga menyebabkan tingginya kredit macet

5. Kerangka Berfikir

Sistem pengendalian intern yang baik dapat dijalankan dengan melaksanakan unsur-unsur pengendalian intern menurut COSO yaitu unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, pengendalian aktivitas, informasi dan pemantauan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit harus memenuhi unsur-unsur pengendalian intern. Unsur-unsur ini sudah sudah baku ditetapkan pada *Committee Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commision (COSO)*.

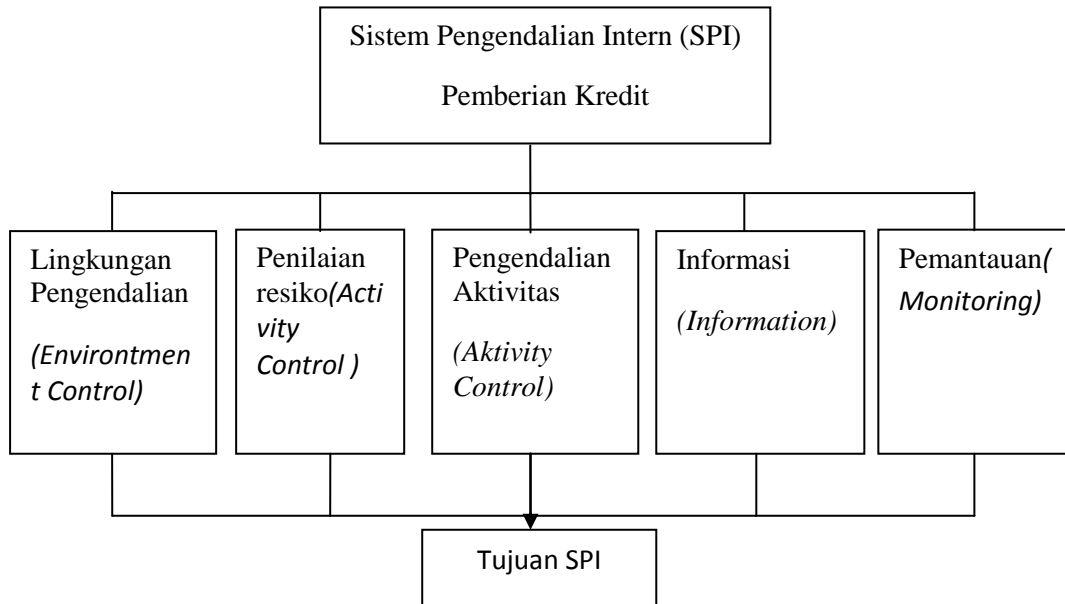
Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijaksanaan dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen perusahaan, direktur dan konsumen serta pemilik suatu satuan usaha terhadap pengendalian atas satuan usaha.

Penetapan resiko oleh manajemen adalah bagian dari penerapan dan pengoperasian pengendalian internal untuk meminimalkan resiko dengan mengidentifikasi dari resiko-resiko yang relevan.

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan pengendalian yang dibuat manajemen untuk memenuhi tujuan. Aktivitas operasional di perusahaan haruslah dapat dikendalikan guna mempermudah manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Informasi digunakan untuk mengidentifikasi, menghubungkan, mengklasifikasikan, menganalisa, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi. Informasi sangatlah penting dalam pengambilan keputusan khususnya pemberian kredit. Informasi yang salah dapat menghasilkan keputusan yang salah pula sehingga meningkatkan resiko kredit.

Aktivitas pemantauan berkaitan dengan penilaian efektifitas rancangan dan operasional pengendalian internal secara periodic dan terus menerus oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Untuk itu maka peneliti menggambarkan kerangka berfikir dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar II-2.



Gambar II-2 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian untuk menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah sistem pengendalian intern pemberian kredit.

B. Definisi Operasional Variabel

Untuk mempermudah pemahaman dalam pemahaman ini maka penulis mengemukakan bahwa definisi operasional dari penelitian ini untuk memberikan penjelasan yang akan dibahas atau diteliti adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

Sistem pengendalian intern pemberian kredit merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian unsur-unsur sistem pengendalian intern yaitu unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, pengendalian aktivitas, informasi dan pemantauan. Pengukuran sistem pengendalian intern pemberian kredit menggunakan unsur-unsur pengendalian intern COSO yaitu : Lingkungan pengendalian (*Environment Control*), Penilaian Resiko(*Risk Valuation*), Pengendalian Aktivitas (*Activity Control*) Informasi (*information*), Pemantauan (*Monitoring*).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penulis melakukan penelitian adalah pada PT Bank BRI Unit Marelan, jalan Raya No.112 Medan. Untuk penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan April 2018, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 3-1

**Tabel III-1.
Waktu Penelitian**

No	Jenis Penelitian	Desember				Januari				Februai				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Kunjungan ke Perusahaan	■	■																		
2	Pengajuan Judul			■	■																
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
5	Seminar Proposal													■	■						
6	Penyusunan Skripsi														■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																		■	■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian ini akan lebih ditekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif (saifuddin Azwar 2008).

2. Sumber data

A. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari perusahaan berupa data mentah yang perlu diolah lagi, dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil opserpasi dan wawancara berupa catatan dan dokumen yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data ini dapat diperoleh dengan cara :

a. Pengamatan(*observasi*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti serta mencatat secara sistematis semua data yang didapat sesuai dengan keperluan penulisan skripsi.

b. Wawancara(*interview*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan interview atau tanya jawab langsung dengan pimpinan atau staf pegawai perusahaan yang memiliki wewenang untuk memberikan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang telah diolah terlebih dahulu. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan menganalisis buku-buku referensi yang berhubungan dengan topik permasalahan. Data sekunder dapat berupa :

a. Sejarah singkat PT Bank BRI Unit Medan Marelan

b. Visi dan Misi PT Bank BRI Unit Medan Marelan

c. Struktur organisasi PT Bank BRI Unit Medan Marelan

- d. Buku-buku referensi yang berhubungan dengan pengendalian intern.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian dengan menggunakan metode atau alat tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis data atau informasi secara jelas mengenai permasalahan yang ada dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan tersebut guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif yaitu analisis yang ditujukan pada perkembangan dan pertumbuhan dari suatu keadaan dan hanya memberikan gambaran tentang keadaan tertentu dengan cara menguraikan dengan sifat-sifat dari obyek penelitian tersebut (Umar,2009, hal36)

2. Menganalisis hasil wawancara dan kuesioner kepada pihak internal mengenai pemberian kredit pada PT Bank BRI.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah PT.Bank BRI

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) didirikan 16 Desember 1895. Kantor pusat Bank BRI berlokasi di Gedung BRI I, JL. Jenderal Sudirman Kav. 44-66, Jakarta 10210. Saat ini, BRI memiliki 19 kantor wilayah, 1 kantor inspeksi pusat, 19 kantor inspeksi wilayah, 462 kantor cabang domestik, 1 kantor cabang khusus, 609 kantor cabang pembantu, 984 kantor kas, 5.380 BRI unit, 3.10 teras & teras keliling 3 teras kapal.

Bank BRI juga memiliki 2 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands dan Singapura, 2 kantor perwakilan yang berlokasi di New York dan Hongkong, serta memiliki 5 anak usaha yaitu Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO/BRI Agro), PT.Bank BRI Syariah, PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRI Life dahulu dikenal Bringin life), BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong dan PT BRI Multifinace Indonesia (BRI Finance), dimana masing-masing anak usaha ini dimiliki oleh Bank BRI sebesar 87,23%, 99,99875%, 91,001%, 100% dan 99% dari total saham yang dikeluarkan.

Berdasarkan Anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BRI adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya dengan melakukan usaha di bidang perbankan, termasuk melakukan kegiatan operasi sesuai dengan prinsip syariah.

Pada tanggal 31 Oktober 2003, BRI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham BRI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 3.811.765.000 dengan nilai nominal Rp.500,- per saham dengan harga penawaran Rp.875,- per saham selanjutnya, opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 lembar saham dan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 lembar saham masing-masing dengan harga Rp.875,- setiap lembar saham telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 10 November 2003 dan 3 Desember 2003. Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih dilaksanakan oleh penjamin pelaksanaan Emisis, Negara Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI. Saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada tanggal 10 November 2003.

Di BRI terdapat 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna yang dipegang pemerintah Negara Republik Indonesia. Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi, perusahaan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan BRI, Pengajuan permohonan agar BRI dinyatakan palit dan pembubaran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan

(BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rudal, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan peraturan Peraturan pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Sampai sekarang PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK (Kredit Usaha Kecil) pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8

milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp.20.446 milyar.

Kemudian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada 10 November 2003 lalu, mencatat sejarah dengan melakukan pencatatan perdana sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Bank BRI secara resmi tercatat sebagai emiten di BEJ dan BES dengan nama saham BBRI. Selain melakukan pencatatan saham perdana di BEJ dan BES, Bank BRI juga melakukan refund, distribusi surat konfirmasi penjatahan kepada investor, distribusi saham secara elektronik serta melakukan pembayaran kepada pemerintah dan emiten.

Pemerintah selaku pemilik saham tunggal BRI melepas sampai 30 persen sahamnya di BRI kepada publik melalui pasar modal.

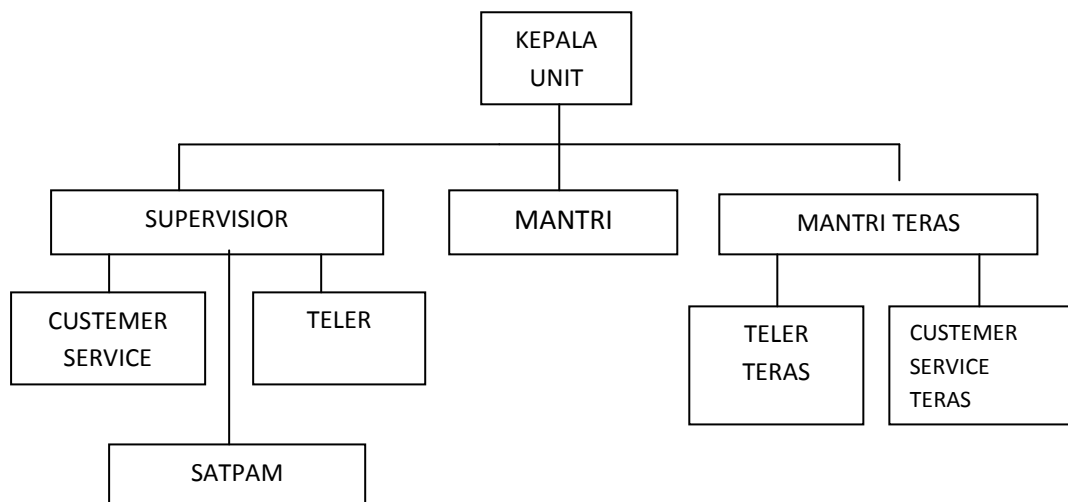
2. Visi dan Misi PT. Bank BRI

Visi BRI adalah menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Dalam mewujudkan visinya, BRI telah menetapkan tiga misi yaitu :

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada semua nasabah melalui jaringan kerja yang terluas yang tersebar dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan Good Corporate Governmance
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Struktur Organisasi PT.Bank BRI Unit Medan Marelan

Organisasi merupakan alat atau wadah yang digunakan oleh perusahaan guna meraslisir tujuan yang telah digariskan. Tujuan utama dalam pembentukan struktur organisasi adalah untuk mengkoordinasikan semua kegiatan, baik secara fisik maupun non fisik yang diarahkan pada pencapaian tujuan. Dalam mewujudkan usaha-usaha perusahaan diperlukan suatu kegiatan terarah sehingga pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara tertip dan lancar berpedoman kepada perangkat-perangkat organisasi yang telah ditentukan. Berikut ini adalah struktur organisasi PT. Bank BRI Unit Medan Marelan :



Gambar IV.1
Struktur Organisasi PT. Bank BRI Unit Medan Marelan

a. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Unit Medan Marelan adalah sebagai berikut :

1. Calon peminjam menyiapkan persyaratan seperti :
 - a. Foto copy KTP dan foto copy BPKB
 - b. Menerima formulir permohonan pinjaman dari bagian administrasi
 - c. Mengisi formulir permohonan pinjaman
 - d. Menyertakan formulir pinjaman yang telah diisi ke bagian administrasi beserta syaratnya-syaratnya.
2. Bagian administrasi menerima
 - a. Formulir permohonan pinjaman dan persyaratannya dari calon peminjam.
 - b. Memeriksa kelengkapan persyaratan dan melakukan pencatatan atau pembukuan berdasarkan nomor urut dan tanggal permohonan; dan
 - c. Menyerahkan formulir permohonan pinjaman dan persyaratan pinjaman kepada petugas survey.
3. *Survey* menerima formulir
 - a. Permohonan pinjaman dan pernyataan pinjaman dari bagian administrasi
 - b. Melakukan analisis dengan melakukan pengecekan kebenaran adanya jaminan berdasarkan pernyataan yang diajukan dan mengenal karakter calon peminjam melalui keluarga dan kerabat.
 - c. Membuat data berita acara untuk melengkapi format transaksi/ penilaian jaminan

- d. Menganalisis dan merangkum persyaratan pinjaman, formulir permohonan pinjaman dan data berita acara dalam bentuk aplikasi pinjaman; dan
 - e. Menyerahkan aplikasi pinjaman tersebut kepada bagian kredit.
4. Bagian Kredit
- a. Menerima berkas-berkas aplikasi pinjaman hasil *survey* dari petugas *survey*
 - b. Melakukan verifikasi dan seleksi kelayakan dari berkas-berkas permohonan kredit dengan format transaksi/penilaian dari petugas *survey*, dan
 - c. Jika telah layak untuk diberikan kredit, maka aplikasi pinjaman ditandatangani dan diserahkan kebagian pengurus perusahaan
 - d. Pengurus jika permohonan diterima, maka pengurus perusahaan menandatangani berkas permohonan jaminan (aplikasi pinjaman) tersebut
 - e. Mengkonfirmasi pemberian jaminan kepada bagian akuntansi untuk melakukan penarikan uang, dan
5. Berkas aplikasi PT. Bank BRI menerima
- a. Berkas aplikasi pinjaman dari bagian kredit
 - b. Memeriksa hasil dari bagian kredit
 - c. Mengambil keputusan untuk menerima atau menolak kredit
 - d. Jika permohonan ditolak, maka berkas dikembalikan ke bagian Administrasi untuk dibuatkan surat penolakan dan diserahkan kepada calon peminjam

- e. Pinjaman dan uang diserahkan ke bagian teller untuk melakukan proses realisasi pemberian kredit.
6. Bagian akuntansi menerima
- a. Berkas aplikasi pinjaman dan uang dari pengurus bank
 - b. Membuat pembukuan pinjaman berdasarkan identitas peminjam dan persyaratan jaminan pinjaman kemudian menyimpan data tersebut kedalam *file* kredit anggota
 - c. Membuat kartu angsuran untuk anggota, nota dan surat perjanjian kredit untuk ditandatangani oleh peminjam
 - d. Setelah itu melakukan pencatatan berdasarkan nota dan menyimpannya ke dalam file pengeluaran kas dan penerimaan kas, dan kemudian menerima jaminan berupa BPKB atau sertifikat lain dari peminjam sebagai pegangan.
7. Bagian teller
- a. Setelah semuanya telah siap dilakukan oleh bagian akuntansi, bagian teller meyerahkan kartu anggunan kredit kepada peminjam
 - b. Bagian teller memberikan uang kepada peminjam serta menerima uang dari peminjam sebagai bentuk simpanan.

Pihak bank harus mengadakan kunjungan atau *survey* ke debitur untuk mendapatkan data atau informasi yang lebih detail dan terinci serta mencari tambahan informasi yang berkaitan dengan permohonan kredit. Data-data tersebut meliputi 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition* dari debitur. Kemudian data tersebut dianalisis untuk mengetahui serta menentukan

kesanggupan dan kesungguhan debitur dalam membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pemberian kredit.

Petugas pemberian kredit akan menganalisa permohonan kredit tersebut berdasarkan analisis berbasis 5C, serta aspek-aspek lainnya dalam penilaian pemberian kredit. Hal tersebut didasarkan pada tujuan analisis kredit yaitu menyelidiki dengan baik secara kuantitatif dan kualitatif calon debitur dan menentukan besar dan jenis kredit, kemauan dan kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu. Sehingga bank dapat memberikan keputusan dalam pemberian kredit.

Setelah permohonan kredit disetujui, pihak bank melakukan pemantauan kredit. Pemantauan pemberian kredit penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk mengukur dan mengawasi pemberian kredit, selain itu bank kurang maksimal dalam memperhatikan analisa dan langkah tindak lanjut yang tepat untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, terbukti dengan kredit bermasalah masih dikatakan kurang baik, karena berada diatas 5%.

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh keadaan internal pada Bank, seperti kurang maksimal dalam melakukan pengawasan, maupun dari debitur yang tidak mampu membayar pinjamannya, hal ini terjadi dimungkinkan karena usaha debitur yang mengalami penurunan seperti produk yang dijual tidak laku, harga bahan baku meningkat terlalu tinggi, terjadi bencana/musibah. Kredit bermasalah tidaklah selalu dapat diselamatkan baik secara damai ataupun hukum. Dalam penyelamatan kredit bermasalah, maka bank memilih kredit-kredit usaha yang lebih mudah diselamatkan terlebih dahulu. Bagi yang masih dapat diselamatkan dan diselesaikan, maka segera dilakukan langkah perbaikannya.

b. Analisis Penilaian Kredit

Penilaian kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lain yang diukur dengan 5C. Tujuan dilakukan penilaian kredit ini yaitu agar kreditur yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Penilaian kredit berperan dalam memperoleh keputusan pemberian kredit pada Bank BRI. Tingginya tingkat keputusan dalam memberikan suatu kredit dengan berpedoman pada penilaian kredit dengan dimensi 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economic*), dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman/kewajibannya.

Hasil dari analisis penilaian pemberian kredit dengan 5C tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pihak bank dalam memberikan keputusan kredit. Agar pihak bank dalam keputusan memberikan kredit pada debitur mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur, maka pihak bank mengadakan survey langsung ke lapangan untuk mengetahui benar atau tidaknya informasi yang telah diberikan oleh para debitur.

Dalam mengukur pemberian kredit keputusan atau atas kredit PT. Bank BRI perlu menganalisa calon nasabah yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yang meliputi :

1. *Analisa Character* (penilaian watak/kepribadian)

Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara PT. Bank BRI dari nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga PT. Bank BRI dapat menyimpulkan bahwa calon

nasabah penerima fasilitas dari bank yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan PT. Bank BRI di kemudian hari.

Untuk menilai karakter ini memang sulit, karena masing-masing manusia mempunyai sifat atau watak yang berbeda satu sama lainnya. Oleh karena itu pihak bank atau bagian kredit harus menguasai praktek untuk dapat mengetahui sifat atau watak dari pada calon debiturnya dan harus mempunyai pengalaman yang cukup dalam menilai karakter seseorang sehingga dapat mengambil kesimpulan tentang karakter calon debitur dengan benar.

Tujuan dari penerapan aspek *character* yaitu untuk mengetahui itikat baik dari calon nasabah dalam mengembalikan kewajibannya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang calon debitur baik pekerjaannya maupun kepribadiannya. Karakter merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah dalam membayar kredit. Orang yang memiliki karakter baik, akan berusaha semaksimal mungkin untuk membayar kreditnya, sebaliknya ketika calon nasabah tidak memiliki itikan baik dalam mengembalikan kewajibannya misalnya ketika nasabah dalam menjalankan usahanya lancar dan mendapatkan keuntungan yang cukup untuk membayar kewajibannya namun tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam membayar kewajibannya maka akan merugikan pihak PT. Bank BRI dan akan menimbulkan kredit macet.

2. Analisa Capacity (Penilaian Kemampuan)

Meneliti nasabah tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen calon nasabah sehingga PT. Bank BRI meyakini bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Pengukuran kapasitas dari calon debitur yang dilakukan PT. Bank BRI dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan diantaranya adalah :

- a. Pendekatan Historis, yaitu melalui nasabah dari sejarah usaha nasabah yang bersangkutan, apakah usahanya banyak mengalami kegagalan atau mengalami perkembangan yang semakin maju dari waktu ke waktu.
- b. Pendekatan Finansial, yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan laba rugi untuk tiga bulan terakhir untuk mengetahui seberapa besar keuntungan atau kerugian serta resiko usahanya.

3. Analisa Capital (Penilaian Modal)

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, terutama PT. Bank BRI harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.

Analisis Capital ini merupakan analisis yang menghubungkan antara permohonan kredit oleh calon nasabah terhadap sejumlah dana yang disetor untuk membiayai suatu barang maka akan semakin ringan calon tersebut dalam melunasi kredit tersebut. Akan tetapi sebaliknya semakin sedikit jumlah dana yang disetor maka semakin berat juga calon nasabah melunasi kewajibannya. Yang jadi pertimbangan dalam analisis ini adalah jangka waktu yang diambil calon nasabah dalam permohonan kredit.

Kondisi seperti ini akan dikembalikan kepada kemampuan calon nasabah dalam pengambilan keputusan kredit PT. Bank BRI dalam menganalisa kapital dapat dilihat pada laporan keuangan usaha yang dijalankan selama beberapa akhir priode, wawancara kepada nasabah tentang pinjaman di bank lain, tujuan penggunaan pinjaman dan menganalisa terhadap data kekayaan nasabah pemberian kredit.

4. Collateral (Jaminan)

Dalam melakukan penilaian resiko terhadap jaminan PT. Bank BRI harus menilai barang proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas kredit yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi resiko yang ditambah sebagai anggunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, jaminan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali kredit dari PT. Bank BRI yang bersangkutan.

Aspek *collateral* yang cukup menjamin pengambilan dana yang dipinjam oleh debitur. Oleh karena itu jaminan menjadi faktor yang penting dalam pemberian kredit jaminan (*colleteral*) sebagai salah satu faktor penting dalam pemberian kredit harus diperhatikan bank dalam upaya mengurangi resiko pemberian kredit. Jaminan dikatakan sebagai faktor penting karena pada dasarnya jaminan bertujuan menghilangkan atau paling tidak meminimalisir resiko yang mungkin timbul yaitu dalam hal debitur tidak melunasi hutangnya.

Faktor jaminan juga mengacu pada sejumlah aktiva yang akan dijadikan sebagai agunan guna kepastian pelunasan di kemudian hari dalam rangka memperkecil resiko. Dengan adanya jaminan maka bank memiliki kedudukan

yang kuat, aman, dan terjamin dalam memperoleh kembali dana yang telah disalurkan kepada debitur melalui pemberian kredit. Jaminan yang ideal adalah jaminan yang memudahkan penagihan utang dan setiap waktu dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang.

Jaminan yang dibebankan bank kepada nasabah agar nasabah lebih serius terhadap apa yang diinginkan oleh bank. Account Officer PT. Bank BRI akan meminta jaminan kepada calon nasabah yang ingin memalukan peminjaman yang meliputi BPKB kendaraan roda dua atau roda empat, Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang bisa berupa tanah kosong, tanah dan bangunan, dan tanah bangunan tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

5. Analisa Condition of Ekonomy(Penilaian Prospek Usaha)

Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima kredit atau fasilitas PT. Bank BRI terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik didalam maupun diluar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun masa yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah dibiayai dengan fasilitas kredit.

Dalam menganalisa aspek *Condition of Ekonomy* PT. Bank BRI melihat pada :

- a. *Trade Checking* yaitu mewawancarai rekanan bisnis calon nasabah mengenai hubungannya dengan rekanan terutama terhadap ketepatan pemenuhan kewajiban. Analisa ini dilakukan oleh analisis PT. Bank BRI
- b. Penyesuaian dengan target market bank, bisnis yang akan dibiayai apakah masuk kedalam target yang telah ditetapkan atau tidak.

- c. Wawancara terhadap calon nasabah tentang tujuan dari pengajuan kredit
- d. Menganalisa tempat usaha nasabah
- e. Mengecek dengan *negative list bussines* (bisnis yang masuk daftar hitam, baik karna kondisi umum maupun kebijakan internal)

B. Pembahasan

Sistem pengendalian intern merupakan proses yang dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang pemberian kredit yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan perasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar di taati oleh semua pihak.

Berdasarkan analisis data sistem pengendalian intern pada prosedur pembelian kredit pada PT Bank BRI unit medan marelان belum berjalan dengan efektif. Dilihat dari aktifitas pengawasan yang dilakukan terhadap dokumen yang dilampirkan secara nasabah.

Aktifitas pengawasan seharusnya Bank BRI melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data dan kebenaran data. Selain itu, pada PT Bank BRI unit medan marelان ditemukan adanya penggunaan dokumen pendukung yang dilampirkan oleh calon nasabah tidak sesuai dengan data yang tertulis seperti ditemukannya alamat calon nasabah yang tertera di KTP padahal syarat- syarat pembelian kredit harus sesuai.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan wawancara pada PT Bank BRI medan marelان belum melaksanakan aktifitas pengendalian

terhadap dokumen yang dilampirkan oleh calon nasabah. Seharusnya ada pengawasan fisik oleh pihak Bank dengan melakukan pencocokan terhadap dokumen yang dilampirkan calon nasabah dalam pelaksanaan pencocokan terhadap dokumen yang dilampirkan oleh calon nasabah dalam pelaksanaan otorisasi yang dilakukan. Diaman ketidakcocokan ditemukan tanda tangan calon nasabah pada surat bukti kredit (SBK). Ini tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Seharusnya penggunaan formulir harusnya diawasi dengan sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi yang dilakukan oleh calon nasabah serta dapat mengawasi akan kebenaran data. Sehingga dengan adanya suatu sistem pengawasan yang efektif dilakukan dalam perusahaan maka akan mencamin ditemukan eakuratan data dan menjadi masukan yang dapat diperjaya untuk menghindari kemungkinan resiko yang akan dihadapi perusahaan.

PT Bank BRI unit medan marelان memisahkan keduddukan fungsi administrasi kredit dengan fungsi akuntansi pemberian kredit. Pemisahaan fungsi sangat penting bagi suatu perusahaan dalam memisahkan otorisasi transaksi berupa transaksi pencatatan dan aktifa yang berkaitan. Dimana dengan terpisahnya fungsi ini dalam kegiatan perusahaan dapat menghindari resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan pemberian kredit.

Agar pembahasan ini lebih terarah maka dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian interen pemberian kredit PT Bank BRI unit medan marelان berdasarkan lima unsur sistem pengendaliaan intern yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian menekankan pada semua faktor kunci yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian menurut Mulyadi (2008) lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dari struktur. Hasil penelitian dari wawancara bahwa lingkungan pengendalian yang dijalankan oleh PT Bank BRI Unit Medan Marelan sudah berjalan dengan baik karena perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang menerangkan pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab sehingga para pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan tepat dan baik.

Semua personel menyadari bahwa lingkungan pengendalian di PT. Bank BRI Unit Medan Marelan menciptakan suasana pengendalian dalam organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Mereka menyadari bahwa efektif tidaknya pengendalian intern dipengaruhi oleh mereka selaku karyawan yang harus bersikap kompeten, jujur dan dapat dipercaya karena mereka adalah pelaksana pengendalian intern tersebut. Perusahaan juga akan memberikan tindakan bagi pegawai yang melakukan tindakan yang merugikan seperti sanksi-sanksi yang telah diberikan kepada pegawai. Walaupun terdapat banyak pengendalian, pada perusahaan tersebut, orang yang tidak jujur dan tidak kompeten dapat mengacukan sistem yang sudah ada. Meskipun pegawai tersebut kompeten dan terpercaya, tiap orang memiliki kelemahan yang melekat. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian intern yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

Sistem pengendalian intern juga tidak terlepas dari kebijakan perusahaan dan praktik untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal. Karena perusahaan harus memiliki kebijakan personil dalam hal penerimaan karyawan baru dan melakukan pelatihan. Konselling dan tindakan perbaikan agar perusahaan dapat memperkerjakan orang-orang yang kompeten serta dipercaya karena penyebab utama kesalahan yang tidak disengaja merugikan perusahaan berasal dari masalah personil, pengetahuan yang tidak memadai dan kesalahan dalam melakukan pertimbangan yang dapat menimbulkan resiko bagi perusahaan.

2. Penaksiran Resiko (Risk Assessment)

Setiap organisasi atau perusahaan tentunya akan menghadapi berbagai resiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuannya, baik resiko yang berasal dari internal perusahaan maupun resiko yang berasal dari eksternal perusahaan. penaksiran resiko mencakup penentuan resiko disemua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi maka diharapkan resiko dapat dihadapi dan diselesaikan dengan baik sehingga dapat menciptakan aktivitas pengendalian intern yang berotorisasi pada pencapaian tujuan perusahaan.

Dari hasil penelitian ini, berdasarkan jawaban dari wawancara mengenai penaksiran resiko dimana PT. Bank BRI Unit Medan Marelan adalah dimana pegawai baru berpengaruh dalam meningkatkan produktifitas kinerja dalam hal pemberian kredit dikarenakan pegawai baru dianggap menguasai hal-hal tentang prosedur pemberian kredit yang ditetapkan dan juga dianggap mempunyai fokus pemahaman tentang pengawasan intern. Dengan adanya pegawai baru ini belum

tentu ia memiliki fokus pemahaman yang sama mengenai pengawasan intern pada PT. Bank BRI Unit Medan Marelan.

Selain itu hasil penelitian dalam dimensi penaksiran resiko lainnya yaitu dalam sistem informasi yang baru, dimana Bank BRI melakukan pengawasan intern dengan menggunakan teknologi berupa komputer dengan melakukan pengecekan edit transaksi pemberian kredit dengan sistem komputer yang ada untuk mengantisipasi kemungkinan resiko yang terjadi akibat perubahan sistem.

Karena dalam proses penaksiran resiko harus mempertimbangkan kejadian dan keandalan ekstern dan intern yang mungkin timbul dan secara tidak baik akan mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengelola, mengikhtisarkan, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

3. Aktifitas pengendalian (*Control Activities*)

Aktifitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan dengan baik. Namun dalam praktiknya hal itu tidak terjadi, karena masih ditemukannya lampiran dokumen yang dilampirkan oleh calon nasabah tidak sesuai dengan bukti pendukung satuan pengawasan intern melakukan pemeriksaan atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern serta melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan sebagai fungsi manajemen. Sedangkan aktifitas pengendalian yang belum berjalan dengan baik di PT. Bank BRI Unit Medan Marelan yaitu salah satunya yang berkenaan dengan otorisasi.

4. Informasi Dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi merupakan bagian terpenting dari proses manajemen. Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa adanya informasi. Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian intern memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengavaluasi efektivitas pengendalian dan untuk mengelola perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan wawancara di PT. Bank BRI Unit Medan Marelan telah menggunakan teknologi informasi yang cukup baik yang dapat digunakan oleh pegawai dalam mendukung kerja pegawai khususnya dalam pemberian kredit dan adanya sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk mengukur nilai transaksi pemberian kredit yang benar terhadap barang jaminan nasabah.

Dimana teknologi informasi pada PT. Bank BRI Unit Medan Marelan berupa catatan yang sah sesuai dengan akad sehingga Bank mengklasifikasikan pencatatan dokumen dari berkas prosedur kredit dan berkas Surat Bukti Kredit (SBK). Suatu sistem informasi dan komunikasi yang baik dan efektif memberikan pertimbangan yang tepat untuk menetapkan metode dan catatan yang akan mengidentifikasi dan catatan semua transaksi yang sah dan dapat menguraikan dengan tepat waktu transaksi yang tepat untuk pelaporan keuangan.

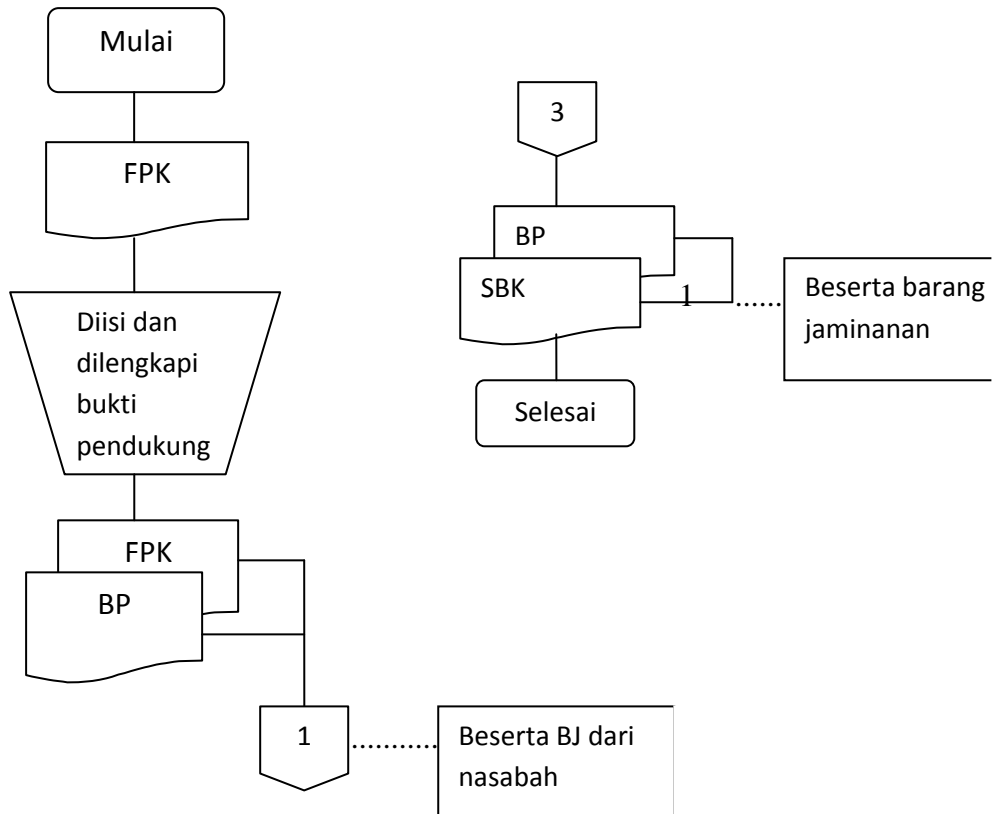
5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan merupakan proses penilaian struktur pengendalian intern sepanjang waktu. Berkenaan dengan penilaian efektifitas pengawasan intern secara terus menerus atau periodik oleh manajemen (*monitoring*) adalah untuk menentukan apakah pengawasan masih berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau perlu adanya perbaikan.

Dari hasil penelitian ini, berdasarkan jawaban atas pertanyaan hasil wawancara mengenai pemantauan dimana PT. Bank BRI Unitv Medan Marelan, dalam aktifitas pemantauan sangat diperlukan untuk menilai rancangan dan pemberian kredit agar dapat mengetahui prosedur atau proses pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh PT. Bank BRI Unit Medan Marelan. Analisis kredit melakukan pemantauan dalam rangka menilai efektifitas rancangan dan operasi pengendalian intern pemberian kredit dengan memonitoring pembayaran pengembalian kredit nasabah. Kurangnya monitoring terhadap nasabah yang sudah mendapatkan kredit, membuat meningkatnya pengembalian kredit. Hal ini menunjukkan lemahnya suatu monitoring pembayaran pengembalian kredit, dapat menggambarkan efektifitas rancangan dan operasi pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Bank BRI Unit Medan Marelan yang krang baik. Sehingga dapat meningkatkan persentase Non Performace Loan (NPL) atau yang biasa disebut kredit macet.

Secara garis besar pelaksanaan proses pemberian kredit bagan arus dokumen perangkat aplikasi pemberian kredit PT. Bank BRI Unit Medan Marelan dapat dilihat pada flowchart berikut :

Nasabah

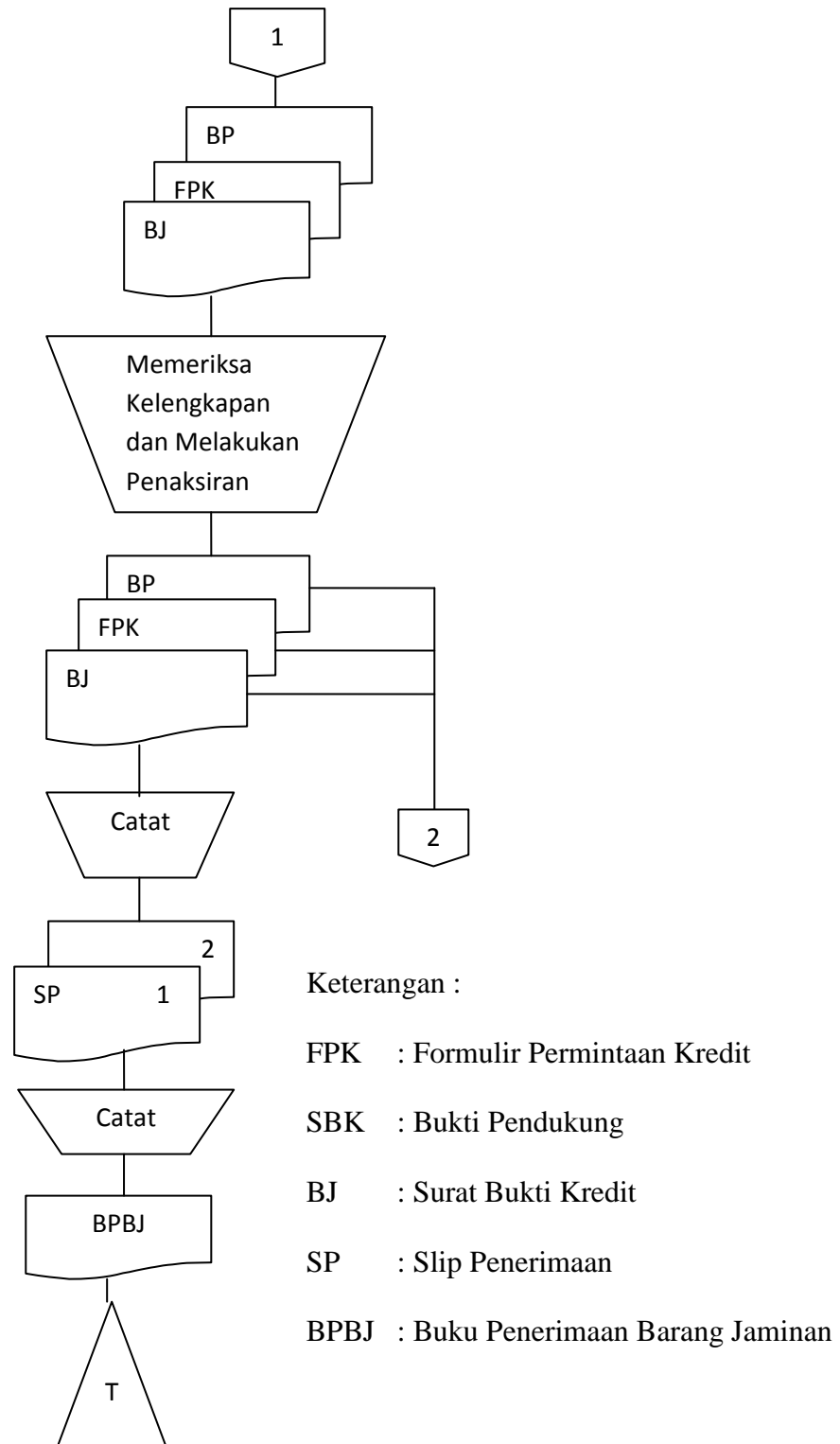


Keterangan :

- FPK : Formulir Permintaan Kredit
- BP : Bukti Pendukung (Kartu Identitas)
- SBK : Surat Bukti Kredit
- BJ : Barang Jaminan

Gambar IV.2
Flowchart Pemberian Kredit Baru

Penaksir



Gambar IV.3
Flowchart Pemberian Kredit Baru

A. Proses Pemberian Kredit Pada Nasabah

1. Prosedur Permintaan Kredit

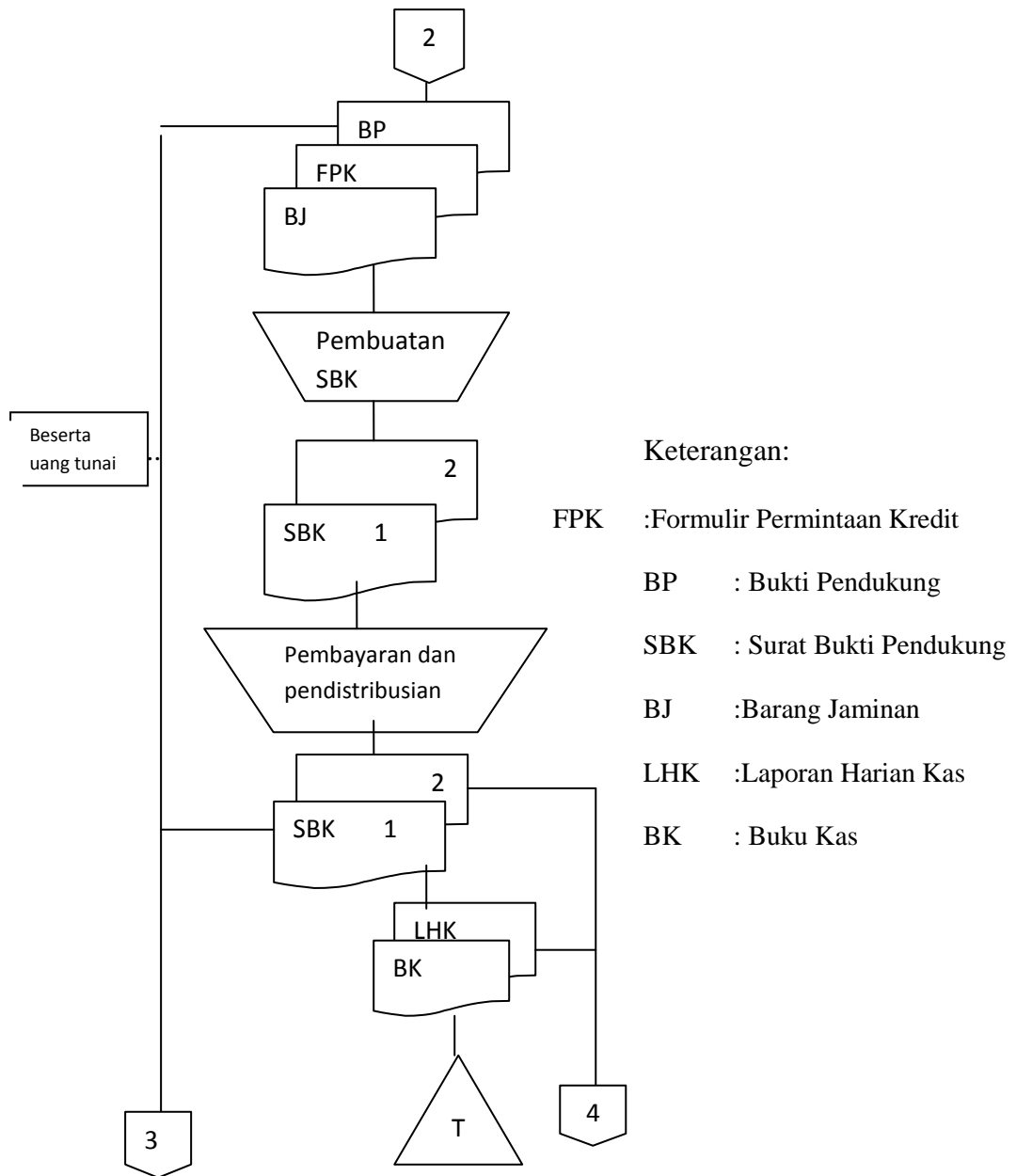
- a. Nasabah mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit(FPK)
- b. Nasabah menyerahkan FPK yang telah diisi dengan melampirkan foto copy KTP/Identitas lainnya serta Barang Jaminan (BJ) yang akan dijaminkan.

B. Proses Pemberian Kredit Bagian Penaksir

2. Prosedur taksiran barang jaminan

- a. Penaksir menerima FPK dengan Lampiran KTP/ Identitas lainnya beserta BJ dari nasabah.
- b. Penaksir memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPK dan BJ yang dijaminkan.
- c. Penaksir menandatangani FPK (pada badan dan kitirnya) sebagai tanda bukti penerimaan BJ dari nasabah.
- d. Menyerahkan kitir FPK kepada nasabah
- e. Penaksir melakukan penaksiran untuk menentukan nilai barang jaminan sesuai dengan Buku Peraturan Menaksir (BPM) dan surat Edaran (SE) yang berlaku
- f. Menentukan besarnya Uang Pinjaman (UP) yang dapat diberikan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Mencatat nilai taksiran dan uang pinjaman pada Buku Taksiran Kredit(BTK), menerbitkan Surat Bukti Kredit (SBK), dan menandatangani SBK rangkap dua sesuai dengan wewenangnya.

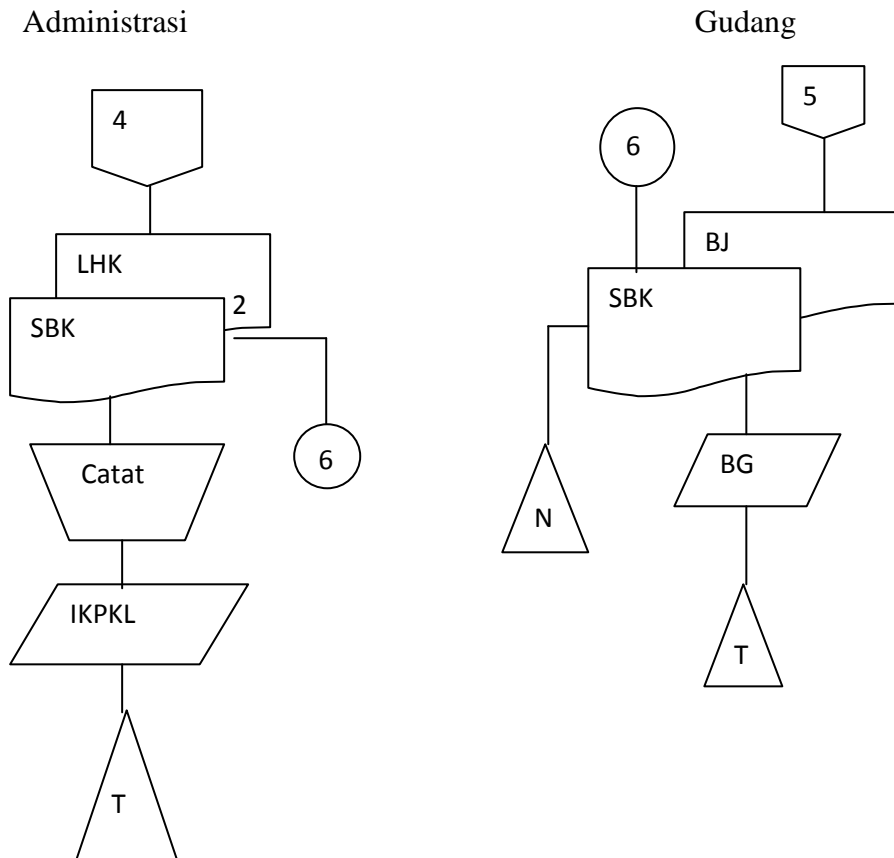
Teller



Gambar IV.4
Flowchart Pemberian Kredit Baru

C. Proses pemberian kredit bagian teller

- a. Penaksir menyerahkan SBK asli dan badan SBK dwilipat dan diberikan kepada kasir
- b. Kasir menerima SBK asli dan badan SBK dwilipat dari benaksir
- c. Kasir mencocokkan SBK tersebut dengan kitir FPK yang diserahkan oleh calon nasabah
- d. Kasir menyiapkan dan melakukan pembayaran Uang Pinjaman (UP) sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBK
- e. Kasir menyerahkan SBK asli beserta uang pinjaman kepada nasabah sedangkan SBK dwilipat diserahkan pada bagian Tata Usaha
- f. Membuat laporan harian kas berdasarkan Buku Kredit dan mencocokkannya dengan Buku Penerimaan Barang Jaminan yang dibuat Penaksir.



Keterangan :

- SBK : Surat Bukti Kredit
- BJ : Barang Jaminan
- LHK : Laporan Harian Kas
- IKPL : Ikhtisar Kredit dan Pelunasan
- BG : Buku Gudang

Gambar IV.5
Prosedur Pemberian Kredit Baru

D. Proses Pencatatan Pemberian Kredit

- a. Petugas tata usaha menerima badan SBK dwilipat LHK, dan kitir FPK dari kasir
- b. Mencatat semua transaksi pemberian kredit semua golongan berdasarkan SBK dwilipat yang diterima dari teller kedalam Kas Kredit(KK) rangkap dua, selanjutnya dicatat di Buku Kredit (BK) dan Buku Kas rangkap dua.
- c. Pada akhir jam kantor, petugas tata usaha membuat rekapitulasi kredit berdasarkan badan SBK dwilipat dan Buku Kredit dan Mencatatnya pada Ikhtisar Kredit Pelunasan (IKPL).

E. Proses Penyimpanan Barang Jaminan

- a. Penaksir memasukan BJ ke dalam kantong dan menempelkan kitir dwilipat SBK. Setelah itu kantong BJ diplombir.
- b. Penaksir menyerahkan BJ yang telah diplombir kepada bagian gudang
- c. Petugas gudang menerima dan menghiung BJ yang diserahkan oleh penaksir
- d. Pada akhir jam tutup kantor, petugas gudang mencocokkan BJ yang telah diterima dengan jumlah yang tertera pada Buku Penerimaan BJ dan apabila sudah cocok petugas membutuhkan tanda tangan pada kolom” Penerimaan” dan dicatat di Buku Gudang (BG)
- e. BJ yang diterima disimpan digudang sesuai dengan golongan, rubric, dan nilai kredit BJ

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, ditinjau dari penialaian kredit yang digunakan dalam pemberian kredit, maka hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Prosedur pemberian kredit yang dilihat pada penilaian kredit yang dilakukan oleh PT.Bank BRI telah menerapkan prinsip 5C yaitu *Charakter, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economioc*. Walaupun PT.Bank BRI telah menerapkan prinsip 5C tetapi tidak memberikan dampak yang baik bagi PT. Bank BRI, terlihat dari meningkatnya jumlah kredit macet yang terjadi. Dalam penerapan penilaian pemberian kredit yang dilakukan PT. Bank BRI terdapat kendala, dimana untuk aspek *character*, pegawai PT. Bank BRI sulit untuk menganalisis watak setiap para nasabah, calon nasabah bisa melakukan sikap yang di buat-buat(tidak jujur), informasi dari *chek* lingkungan bisa juga memberikan informasi yang tidak benar.

Sedangkan aspek *capacity* (kemampuan nasabah) dari survey awal yang dilakukan oleh PT. Bank BRI kepada nasabah, usaha yang dijalani berkembang, tetapi setelah kredit berlangsung di bank, kemampuan usaha nasabah mengalami penurunan, dan hal ini yang menimbulkan terjadinya kredit yang meningkat pada PT. Bank BRI, dikarenakan kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman mengalami penuruna. Begitu juga untuk aspek *colleteral* atau jaminan yang diberikan nasabah, walaupun jumlah jaminan yang diberikan oleh nasabah bernilai lebih besar dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan bank, tetapi

bank memberikan waktu lebih untuk tindakan melakukan pelelangan terhadap jaminan tersebut, sehingga dana produktif yang dimiliki bank mengalami penurunan.

Hal ini menunjukkan bahwa penilaian kredit yang dilakukan PT. Bank BRI dalam pengambilan keputusan pemberian kredit kurang efektif, dimana PT. Bank BRI kurang mampu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pemberian keputusan atas kredit yang akan diberikan kepada debitur.

B. Saran

1. Sebaiknya PT. Bank BRI mempertegas penerapan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan pada pemberian keputusan atas kredit yang diberikan dari prosedur permohonan kredit sampai dengan prosedur penyelamatan kredit bermasalah. Tindakan ini merupakan salah satu upaya bank untuk mengurangi resiko kredit macet sebab bank dapat menilai itikad baik permohonan kredit dilihat dari prinsip 5C.
2. Sebaiknya PT. Bank BRI juga memperhatikan analisis terhadap prospek usaha nasabah, karena usaha nasabah merupakan sumber pemasukan bagi nasabah untuk dapat melunasi kredit berikut dengan bagi hasilnya. Bila bank hanya terpaku pada nilai agunan saja, justru bank dapat menjerumuskan nasabahnya dan itu bukan berarti penyelesaian yang saling menguntungkan lagi bagi nasabah maupun bank karena ada pihak dapat dirugikan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan untuk menambahkan variabel dalam penelitian dengan mengukur kinerja perusahaan, sehingga hasil

penelitian menunjukkan hasil yang lebih baik. Dan sebaiknya penggunaan dalam periode pengamatan dalam penelitian selanjutnya menggunakan periode yang lebih panjang sehingga dapat memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kondisi sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens 2007, (*Dalam penelitian Suma Dewi 2012, Analisis system pengendalian intern atas pemberian kredit mikro pada PT Bank Sumut, Medan*). Universitas Sumatera Utara
- Clara Niken Dewi, 2010, *Analisis Pengendalian Intern Pada Sistem Pemberian Kredit pada Credit Union Berend Gratia KK Yogyakarta*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Diana, 2011, *Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Mikro Pada PT. Bank Mandiri tbk Cabang Majapahit Semarang*, Universitas Negeri Semarang.
- Eli suhayati (*Dalam Penelitian Tina Triana, 2014. Analisis sistem pengendalian intern pada Badan Usah Milik Desa (BUMdes) desa kepenuhan barat, Riau: Universitas Pasir Pangaraian*
- Fitri, 2013. *Analisis Sistem Pengendalian Intern terhadap Pemberian kredit pada PT. BPR Bukit Cati Pematang Panjang. Sumatera Barat. Universitas Muhammadiyah*
- Ismail, 2013 *Manajemen Perbankan*, Jakarta
- Kasmir, 2011. *Bank dan Lembaga keuangan*, jakarta :PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir, 2010. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Mulyadi, 2013. *Sistem Akutansi*, Yogyakarta: Salemba Empat
- Munawaroh, 2011. *Peranan Pengendalian Intern Dalam Menunjang Efektifitas Sistem*
- Nugroho 2007 (*Dalam Jurnal Muhammad nurazri, Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Kredit Pada BRI Kota Samarinda*) @ *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2015, 3(3):661-674, Samarinda
- Oka Noni 2014. *Analisis efektifitas Struktur Pengendalian Intern atas prosedur Kredit Pada BANK Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung*. Bali. Universitas Pendidikan Ganhesa Singaraja, Indonesia
- Peni Rosalina, 2013. *Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun Surabaya: Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya*
- Risma 2013, *Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah pada PT Bank BRI Cabang Kediri : STKIPPGRI*

Romney 2009.(*Dalam penelitian Rosaliana 2014, Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun Surabaya*), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya

Sukrisno 2008.(*Dalam Penelitian Nani wahyuni, Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Di PT Bank Harga Cabang Semarang*), Universitas Diponegoro Semarang

Wildan,2015. *Analisis sistem pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit Mikro pada PT bank Rakyat Indonesia Unit Banyuasri*.STIE Bina Karya Tebing Tinggi